

SKRIPSI

BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DESA BARUA DALAM PILKADES

TAHUN 2021 DI DESA BARUA KECAMATAN EREMERASA

KABUPATEN BANTAENG



Oleh:

SALDI JULIANTO

Nomor Induk Mahasiswa :105641108619

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DESA BARUA DALAM PILKADES

TAHUN 2021 DI DESA BARUA KECAMATAN EREMERASA

KABUPATEN BANTAENG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Saldi Julianto

Nomor Stambuk : 105641108619



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : Budaya Politik Masyarakat Desa Barua Dalam
Pilkades Tahun 2021 Di Desa Barua Kecamatan
Eremerasa Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : Saldi Julianto

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108619

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

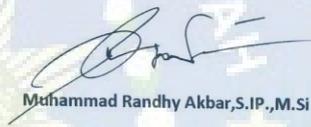
Menyetujui

Pembimbing I



Hamrun, S.IP., M.Si

Pembimbing II



Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan



Dr. Hj. Hyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730.727

Ketua Program Studi



Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207.163

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0161/FSP/A.4-II/VII/44/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis 20 Juli tahun 2023.

TIM PENILAI

KETUA

SEKERTARIS


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Lubur Prianto, S.IP., M.Si

TIM PENGUJI

1. Dr. A Rosdianti Razak, M.Si (Ketua) 
2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si 
3. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si 
4. Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si 

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Saldi Julianto

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108619

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini dengan judul, Budaya Politik Masyarakat Desa Barua Dalam Pilkadaes Tahun 2021 Di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain,tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini,saya siap menanggung resiko /sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketikan keilmuan dalam karya ilmiah ini,atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian dari karya ini.

Yang Menyatakan, 23 Mei 2023



Saldi Julianto

ABSTRAK

Saldi Julianto, Hamrun, Muhammad Randhy Akbar, Budaya Politik Masyarakat Desa Barua Dalam Pilkades Tahun 2021 Di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya politik masyarakat Desa Barua dalam pilkades tahun 2021 di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng melalui pengelompokan masyarakat berdasarkan tipe budaya politik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Analisis data kualitatif dilakukan apabila data pengamatan yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan yang berwujud kata-kata tidak menggunakan angka serta dalam penyusunan tidak menggunakan kategori atau struktur klasifikasi. Data kualitatif bisa saja dikumpulkan dengan berbagai cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun dalam teks kemudian diperluas tanpa menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai pembantu dalam menganalisis data, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang di teliti yaitu melihat kesadaran dan pemahaman politik masyarakat melalui pengelompokan masyarakat berdasarkan tipe budayanya sehingga terbentuk suatu budaya politik. Dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi.

Hasil penelitian ini yaitu masyarakat desa Barua pada umumnya masyarakat desa barua tergolong kedalam budaya politik parokial, subjek/kaula dan Partisipan. Hal tersebut di lihat dari kesadaran politik dan Pengetahuan masyarakat mengenai politik, mereka ikut serta dalam proses dan berpartisipasi saat pilkades. Masyarakat menyadari pilihan politik mereka, namun sebagian dari mereka masih bersikap tertutup dan acuh tak acuh terhadap aktivitas politik dan juga masih adanya *money politik* sebagai ciri dari masyarakat tradisional.

Kata Kunci : Budaya Politik, Masyarakat, Pilkades

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Budaya Politik Masyarakat Desa Barua Dalam Pilkadaes Tahun 2021 Di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng”. Tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi para pembaca secara umum dan secara khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama dan yang paling istimewa penulis persembahkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua, Bapak Sarifuddin dan Ibu Rosnaeni tercinta berkah doa dan dukungan moral maupun moril, perhatian maupun kasih sayang yang begitu luar biasa tulus tumpah pamrih. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada saudara saya Idul Aprianto dan Riswanda terima kasih banyak sudah menjadi saudara yang hebat untuk penulis.

Serta pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Pembimbing I bapak Hamrun, S.IP., M.Si dan pembimbing II bapak Muhammad Randhy akbar, M.Si yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I dan Ibu Nur Khaerah,S.IP.,M.IP selaku Ketua Prodi dan Sekretaris prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Kepala Desa Barua, Tokoh-Tokoh Masyarakat desa Barua, serta seluruh pihak yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
5. Seluruh bapak ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada Staf Tata Usaha atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
7. Untuk bapak Hanafi, S.Pd.,MM dan Indar Jaya, S.E.,MM terima kasih telah menjadi orang tua, sahabat, kakak, dan tameng terbaik bagi penulis.
8. Untuk teman-teman kelas IPC terima kasih atas perjalanan dan pelajaran selama menjadi mahasiswa di Unismuh.
9. Untuk saudara-saudari saya Mumi Parangloe, Mumi Lonrong dan Mumi Saumata terima kasih atas kerukunan, kekompakan dan kerja sama yang baik selama ini

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena segala kesempurnaan hanya

milik Allah SWT, oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan, saran, dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

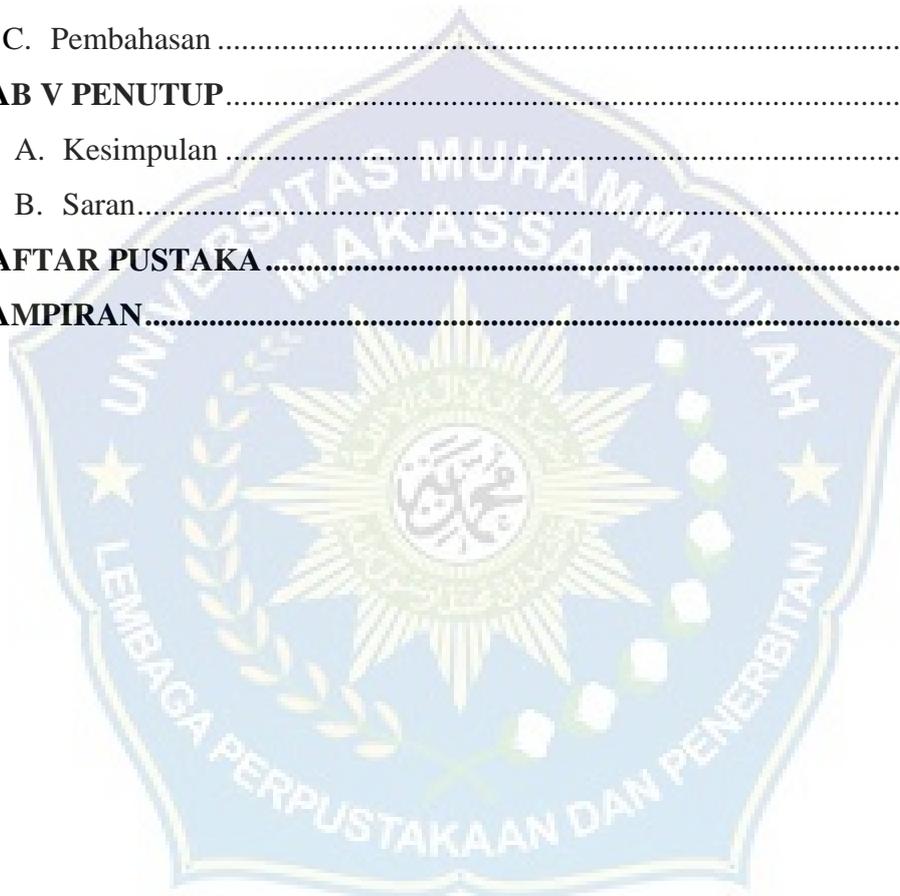
Yang Menyatakan, 23 Mei 2023



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	12
1. Pengertian budaya politik	12
2. Orientasi dan Sikap dalam Budaya Politik	18
3. Tipe-tipe Budaya politik	22
4. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	31
C. Kerangka Pikir	36
D. Fokus Penelitian	37
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Informan Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40

F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Keabsaha Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	45
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng.....	45
2. Gambaran Umum Desa Barua	46
B. Hasil Penelitian.....	48
C. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	36
Gambar 4.1 Batas-Batas Wilayah	45
Gambar 4.2 Peta Kabupaten Bantaeng.....	46
Gambar 4.3 Peta Desa Barua	47



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Daftar Nama Calon	46
Table 4.1 Jumlah Penduduk Desa Barua	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya budaya politik yang berkembang dalam suatu Negara dilatar belakangi oleh situasi, kondisi dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teoritik budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan di akui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

Dalam budaya politik di Desa Barua kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya kepada Negara itu sangatlah penting, disana dapat dinilai seberapa baiknya budaya politik masyarakat tersebut. Bagian terpenting dari perilaku politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa tersebut dapat dilihat dalam kadar kekentalan budaya pada suatu masyarakat. Sejauh mana budaya itu mempengaruhi perilaku seseorang, sejauh itu pula perilaku politik masyarakat mengikatnya. Aronoff dan Kubik (Sumartono, 2018) melihat bahwa praktik budaya pada politik merupakan bagian kultural yang menitikberatkan pada persoalan masyarakat sipil (*civil society*) yang berkembang dan beradaptasi

melalui kanal kultural terhadap aspek politik, dalam prosesnya kultural menjadi dimensi yang beradaptasi melalui proses pembentukan awal (*organize*), pengelolaan (*maintain*), mediasi dan membangun keseimbangan.

Sebagai suatu persoalan yang membicarakan mengenai sikap dan orientasi psikobudaya sebuah masyarakat terhadap politik, persepsi terhadap kepemimpinan dan pandangan-pandangan serta reaksi masyarakat terhadap unsur-unsur atau hal-hal yang berkait-rapat dengan politik. Semua aspek budaya politik ini boleh berubah dari berbagai dimensi dan pengalaman yang dilalui oleh sebuah masyarakat (Mohd Zain, 2021). Tingkat kesadaran perilaku politik masyarakat desa Barua bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur seberapa majunya budaya politik di desa Barua dalam pemilihan kepala desa. Kesadaran politik masyarakat yang tinggi menandakan budaya politiknya sangat baik dan maju. Sementara apabila masyarakat apatis terhadap partisipasinya dalam pemilihan kepala desa maka bisa dikatakan budaya politiknya sangat kurang. Dengan demikian, apabila kesadaran politik masyarakat yang mereka dambakan dapat berjalan secara serasi, budaya politik telah dapat berfungsi dengan baik. Atau dengan kata lain budaya politik suatu bangsa telah mencapai tingkat kematangan.

Artinya, budaya politik yang berkembang di desa Barua di latarbelakangi oleh situasi, kondisi, pendidikan dan yang terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat desa Barua maupun wilayah lainnya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan Pemilihan Umum di desa Barua berorientasi pada budaya politik dalam suatu masyarakat dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat itu, bahkan di katakan bahwa kehidupan bermasyarakat desa Barua di penuhi oleh interaksi antarorientasi dan antar nilai. Budaya politik ialah sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya. (Ilona et al., 2020; Sumartono, 2018) Pemilihan Umum di Indonesia bertujuan memilih seseorang untuk jabatan politik tertentu. Pemilu dilakukan untuk jabatan pada setiap tingkat pemerintahan hingga tingkatan desa.

Salah satu proses demokrasi di Indonesia pada tingkat desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa untuk memilih calon kepala desa sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi politik secara langsung untuk memilih pemimpin di desa, diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan Pemerintahan yang lebih baik bagi percepatan pembangunan pada tingkat desa. Partisipasi politik masyarakat di desa sangat diperlukan demi terlaksananya tujuan dan cita-cita dari Undang-Undang dasar 1945 untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat (2) butir kelima yang mengharuskan agar setiap masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa. Dengan begitu masyarakat bisa secara langsung mempengaruhi segala kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah pusat untuk memfasilitasi penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa agar dapat berlangsung secara demokratis, yaitu melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Selanjutnya ketentuan teknis lebih lanjut yang mengatur tentang pemilihan kepala desa diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berisi “(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Pemilihan kepala desa dijadikan sebuah pesta rakyat desa untuk menyalurkan haknya, untuk menyalurkan aspirasinya dengan cara memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu daerah di Indonesia yang dalam penerapan sistem otonomi daerah telah mendorong terjadinya dinamika kepemimpinan politik di kabupaten Bantaeng. Rakyat dalam sistem otonomi

daerah berhak memilih pemimpin untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini memperlihatkan kenyataan bahwa setidaknya sejumlah pemimpin lokal telah membuktikan keberhasilan mengelola permasalahan kehidupan masyarakat yang terjadi pada daerahnya. Pemilihan kepala Desa Barua menjadi sebuah instrumen untuk membentuk pemerintahan modern dan Demokrasi, kegiatan pesta demokrasi dilaksanakan di tingkat wilayah dengan skala terkecil, ini pada kenyataannya sudah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Pemerintah tentang tata cara kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga semua rangkaian tahapan-tahapan mulai dari pembentukan panitia pemilihan kepala desa sampai pada tahap pelantikan oleh kepala desa yang terpilih dengan harapan sesuai dengan wilayah terkecil ini pada ketentuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu maka proses Pilkades akan berjalan seperti yang diharapkan tanpa mengganggu keutuhan masyarakat. Tentu yang menjadi harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk menjadi pemimpin dan menjalankan sistem pemerintahannya sebagai Eksekutif di desa.

Masyarakat Desa Barua selaku warga negara perlu terlibat aktif berpartisipasi dalam segala kegiatan politik, salah satunya yaitu dengan cara menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum atau dalam kegiatan dengan cara ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dengan demikian, perilaku masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pemilihan kepala desa merupakan bentuk sikap

masyarakat desa Barua terhadap pemerintah sekaligus merupakan telaah perilaku politik. Tindakan dan perilaku politik individu ditentukan oleh pola orientasi umum yang nampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik.

Termasuk yang terjadi di desa Barua seringkali di dapati *Black Campaign* dan *Money Politic* sebagai sarana untuk meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sehingga melahirkan sebuah nilai yang mencerminkan budaya politik yang masih kurang baik. Sikap masyarakat desa Barua melahirkan sebuah konflik sosial antar pendukung di masing-masing calon di desa Barua dalam pemilihan kepala desa membentuk sebuah budaya politik, termasuk menjadikan pemilihan kepala desa sebagai ajang judi/sewa untuk meyakinkan kekuatan politik seorang calon, sehingga sikap saling tidak menerima kenyataan menjadikan renggangnya hubungan sosial antar masyarakat setelah pemilihan.

Selain itu, adanya sikap masyarakat desa Barua terhadap proses pemilihan kepala desa di desa Barua yaitu “siap menang tidak siap kalah” sehingga terjadi saling tidak menerima kenyataan dan konflik sosial antara pendukung dari masing-masing calon menjadikan proses demokrasi di desa Barua menjadi sebuah budaya politik yang kurang baik.

Pembentukan budaya politik masyarakat desa Barua dapat berkembang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan terhadap objek-objek politiknya, hal ini di sebabkan timbulnya nilai-nilai yang masuk dari luar atau masuknya masyarakat pendatang yang mempengaruhi budaya politik masyarakat yang ada di desa Barua.

Selain faktor tersebut, kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat desa Barua juga menjadi faktor yang mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Oleh hal tersebut, terjadinya hubungan itu telah menimbulkan nilai-nilai dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat desa Barua. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Budaya Politik Masyarakat Desa Barua Dalam Pilkades Tahun 2021 di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian yaitu “Bagaimana budaya politik masyarakat Desa Barua dalam pilkades tahun 2021 di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng?”

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka di ketahui tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana budaya politik masyarakat dalam pilkades tahun 2021 di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

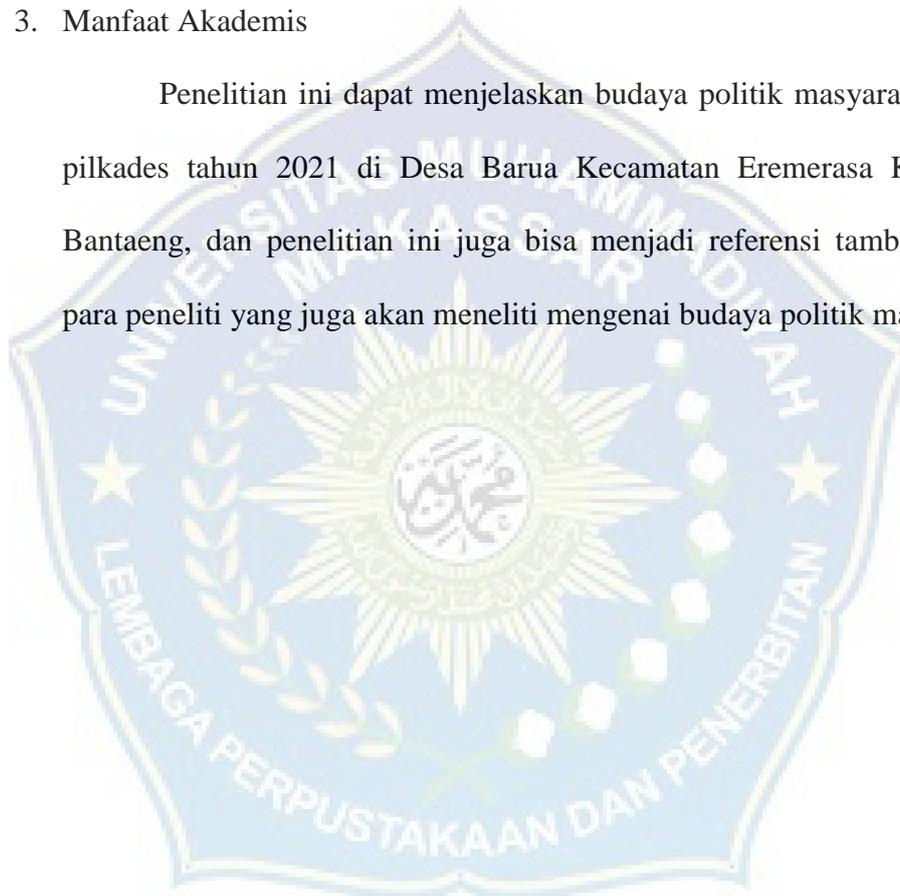
Di harapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala Desa

2. Manfaat Praktis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi seluruh elemen yang bersangkutan untuk menjadi acuan dalam menentukan dan menganalisis budaya politik masyarakat di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan masing-masing

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjelaskan budaya politik masyarakat dalam pilkades tahun 2021 di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, dan penelitian ini juga bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai budaya politik masyarakat.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Lastari, 2018)	Budaya Politik Masyarakat Kampung Arab Al-Munawar 13 Ulu Palembang	Al- Munawar memiliki orientasi politik yang relatif tinggi terhadap sistem politik secara umum. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap politik tetapi sifatnya pasif. Walaupun mereka mayoritas Islam namun dalam pemilu mereka sama sekali tidak berafiliasi pada partai Islam, mereka memilih sesuai dengan tingkat pengetahuan dan naluri mereka. Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak mampu berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Untuk mencalonkan diri sebagai RT saja mereka tidak ada kemauan. Kehidupan politik

			<p>dianggap sebagai sarana transaksi, seperti halnya penjual dan pembeli.</p> <p>Warga dapat menerima berdasarkan kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri.</p>
2	(Endana, 2022)	Partisipasi Dan Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Pada Pilkada Serentak Tahun 2020	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo pada Pilkada serentak tahun 2020 lebih dominan ke budaya politik kaula. Hal ini dibuktikan dengan bahwa masyarakat kecamatan Tarik masih memiliki minat, pengetahuan serta pemahaman terhadap aktivitas politik, namun masyarakat enggan atau tidak mau ambil pusing dengan ikut mempengaruhi sebuah kebijakan politik di masa depan.</p>
3	(Wardhanie, 2020)	Budaya Politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong	<p>Budaya politik Masyarakat Desa Kedadongan berawal dari interaksi sosial yang bermuatan politik dan mengalami internalisasi ke dalam</p>

		Kabupaten Kebumen Pada Pilkada Langsung Tahun 2015	masyarakat yang selanjutnya menentukan pemahaman mereka terhadap sistem politik. Kemudian, dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pendidikan, media massa, dan imbalan. Hal tersebut menghasilkan orientasi kognitif yang cukup baik dan orientasi afektif yang cukup baik, tetapi orientasi evaluatif kurang baik pada saat Pilkada Langsung Tahun 2015. Kemudian diketahuilah pemahaman masyarakat terhadap sistem politik, input dan output dalam sistem politik, dan peran mereka dalam sistem politik.
--	--	---	---

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini pada :

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Budaya Politik Masyarakat Kampung Arab Al-Munawar 13 Ulu Palembang adalah penelitian ini membahas tentang budaya politik masyarakat pada pemilihan kepala desa sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang budaya politik

dengan identitas islam pada masyarakat kampung Arab Al Munawar 13 Ulu Palembang

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan Judul Partisipasi Dan Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah penelitian ini membahas budaya politik masyarakat pada pemilihan kepala desa sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang partisipasi dan budaya politik pada pilkada serentak.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan Judul Budaya Politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Pada Pilkada Langsung Tahun 2015 adalah penelitian ini membahas budaya politik masyarakat pada pemilihan kepala desa sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang budaya politik pada pilkada langsung Tahun 2015

B. Kerangka Teori

1. Pengertian tentang budaya politik

a. Pengertian budaya politik

Almond dan Verba memberikan defenisi tentang “Budaya politik adalah sikap yang khas kepada warga negara terkait sistem politik maupun beranekaragam bagian-bagiannya, serta sikap kepada peran masyarakat yang terdapat pada sistem tersebut”. Budaya politik selalu inheren pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang mana hidup dalam sistem politik dalam sistem politik tradisional, transnasional serta modern. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya politik merupakan sikap yang khas kepada warga negara terhadap politik dan pemerintahan serta

aktivitas politik, bukan hanya sekadar ditetapkan dari tujuan yang diinginkan, melainkan dari harapannya mengenai politik yang dimiliki serta perspektif terkait keadaan politik.(Agustina & Anshori, 2021; Sumartono, 2018)

Pada budaya politik dapat ditemukan bagaimana orientasi atau persepsi individu mengenai sistem kekuasaan, negara, pemerintah, dan orientasi mereka sebagai bagian dari negaranya. Budaya politik begitu melekat pada tiap golongan masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional, transisional, maupun masyarakat modern. Budaya politik pula berkaitan dengan perilaku politik atau tindakan manusia dalam situasi politik. Perilaku politik seseorang akan sangat dipengaruhi oleh pola orientasi yang sama, yang secara jelas mencerminkan budaya politik.

Masyarakat dari suatu negara pasti memiliki budaya politik begitu pula individu-individu yang memiliki orientasi dan persepsi terhadap sistem politiknya. Hal ini dapat terjadi pada masyarakat modern dan masyarakat tradisional, atau bahkan pada masyarakat primitif. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam masyarakat itu menilai tempat dan peranannya di dalam sistem politik. Pengertian tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu.

(Sumartono, 2018) Berikut ini beberapa pengertian budaya politik (yang dapat dijadikan sebagai pedoman :

1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik memberikan pemahaman rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain,
2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisa bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup,
3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan, dan
4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat.

Beberapa pemahaman budaya politik dari beberapa pendapat para ahli diantaranya adalah Robert Dahl (Syuhada, 2020) menyebutkan unsur-unsur budaya politik yang penting adalah:

- a. Orientasi pemecahan masalah-masalah, apakah mereka pragmatis atau realistik;
- b. Orientasi terhadap aksi bersama, apakah mereka bersikap kerjasama atau tidak (ko-operatif atau non ko-operatif);

- c. Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak;
- d. Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak.

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu berorientasi terhadap perilaku dan sikap masyarakat sehingga menurut Kantaprawira (Syuhada, 2020); “budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan, karena sistem politik itu sendiri adalah interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan dan wewenang.

Aktivitas politik selalu berkaitan dalam kegiatan interaksi warga negara dengan pemerintah dan insitusi lain selain pemerintah. Hal ini juga menghasilkan variasi opini dan pengetahuan mengenai praktik perilaku politik. Maka dari itu, individu dapat mengukur dan melihat pengetahuan, perasaan, dan sikap masyarakat terhadap pemerintah dan pemimpinnya (Sapariah et al., 2022)

Budaya politik sebagai suatu persoalan yang membicarakan mengenai sikap dan orientasi psikobudaya sebuah masyarakat terhadap politik. Asasnya ialah budaya politik merangkumi persepsi ke atas tabir urusan pemimpin, persepsi masyarakat terhadap sistem politik, persepsi terhadap kepemimpinan dan pandangan-pandangan serta reaksi masyarakat terhadap unsur- unsur atau hal-hal yang berkait-rapat dengan politik. Semua aspek budaya politik ini boleh berubah dari pelbagai dimensi dan pengalaman yang dilalui oleh sesebuah masyarakat (Mohd Zain, 2021).

Masyarakat tidak dapat terlepas dari politik, hal tersebut sudah menyatu dengan kehidupan mereka. Kehidupan politik merupakan bagian dari interaksi hidup mereka, baik dengan sesama masyarakat maupun dengan pemerintah atau lembaga-lembaga di luar pemerintah (lembaga non-formal). Interaksi tersebut mengalami internalisasi ke dalam masyarakat yang selanjutnya membentuk beragam pandangan, sikap, dan pengetahuan tentang praktik-praktik politik dalam sistem politik yang akan menentukan bagaimana perilaku masyarakat tersebut.

Sesuai dengan teori Gabriel Almond dan Sidney Verba, kita dapat mengetahui budaya politik masyarakat mengenai sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku mereka terhadap politik. Akan tetapi, masih sedikit masyarakat Indonesia yang memiliki budaya politik aktif, mayoritas bahkan tidak mengerti politik dikarenakan kondisi sosio-ekonomi yang kurang mendukung. Ada pula yang tidak peduli terhadap politik di Indonesia. Sekalipun masyarakat Indonesia terlibat aktif dalam aksi politik, hal itu dikarenakan adanya pengaruh *peer pressure*, Sangat sedikit masyarakat Indonesia yang betul-betul memahami situasi politik di Indonesia. Rendahnya partisipasi politik pada masyarakat Indonesia dapat disebabkan karena kurang memadainya tingkat sosialisasi budaya politik. Agar terciptanya budaya politik yang aktif maka harus di dukung oleh semua pihak terutama oleh pemerintah itu sendiri. (Pureklolon, 2021; Suryana, 2020)

Sumartono (Sumartono, 2018) menggambarkan budaya politik di Indonesia saat ini sebagai berikut:

1. Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan,
2. Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu sisi masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial. Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; puritanisme dan non puritanisme dan lain-lain. Kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih bersifat paternalisme dan patrimonial, hal ini masih tercermin dengan berkembangnya fenomena bapakisme atau sikap asal bapak senang, dan
3. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Budaya politik dipengaruhi oleh sikap dan lingkungan. Oleh karena itu, terkadang kita menemukan budaya politik setiap wilayah berbeda-beda. Bahkan bukan hanya itu, budaya politik antarindividu pun berbeda-beda.

Perbedaan budaya politik ini dianggap wajar karena setiap orang memiliki pengalaman politik yang berbeda-beda.

Seiring perkembangan waktu budaya politik juga mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya yaitu dengan menggunakan metode baru sehingga dikenal dengan budaya politik baru. Selain itu, kehampaan terhadap media arus perdana milik pemerintah juga telah mencetuskan ledakan media alternatif berikutan ruang politik yang sempit dengan pelbagai bentuk sekatan. Penggunaan media alternatif dalam politik telah mewujudkan budaya politik baru. Wong dalam (Abdullah et al., 2018) (Lastari, 2018)

Budaya politik juga dimaknai dengan interaksi antar lembaga pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Budaya politik dalam hal Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum, karena disamping perilaku politik juga ada perilaku lain seperti perilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku keagamaan dan sebagainya. Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik.

2. Orientasi dan Sikap dalam Budaya Politik

Dalam pendekatan perilaku politik, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk

tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang.

Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpisah-pilah tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Semisal seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin.

Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi, diwarnai, atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya, pengetahuan orang tersebut tentang sesuatu simbol politik, misalnya, dapat pula membentuk atau mewarnai perasaannya terhadap simbol politik itu. Boleh jadi, pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Pada hakekatnya kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif, dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan politik, maka kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subjektif bagi politik. Karena kebudayaan politik merupakan salah satu aspek dari kehidupan politik, maka jika kita ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu kelompok masyarakat secara bulat dan utuh, maka kitapun dituntut melakukan penelaahan terhadap sisinya yang lain.

Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem, di samping itu kebudayaan

politik lebih mengutamakan dimensi psikologis suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan, atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam suatu masyarakat sekaligus harapan-harapannya. Variabel yang ada bisa berawal dari suasana psikologis seseorang, argumentasi umum dalam jajaran psikologi sosial, dan terminal terakhir bertumpu pada status sosial-ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai determinan pembentukan orientasi, sikap, dan tingkah laku politik.

Beberapa definisi sikap yaitu, berorientasi kepada respon: sikap adalah suatu bentuk dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung (*Unfavourable*) pada suatu objek politik. Berorientasi kepada kesiapan respon: sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek politik dengan cara-cara tertentu, apabila dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon dan suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dari situasi sosial politik yang telah terkondisikan. Berorientasi kepada skema triadik: sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif dan afektif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek politik di lingkungan sekitarnya. Secara sederhana sikap didefinisikan sebagai ekspresi sederhana dari bagaimana kita suka atau tidak suka terhadap beberapa hal.

Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrinnya dan aspek generikanya. Pertama, menekan pada isi atau materi budaya politik yang dapat

dijumpai pada studi tentang doktrin; seperti sosialisme, demokrasi atau nasionalisme, dan islam. Kedua, aspek generika; menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik. Umpamanya, apakah budaya politiknya militan, utopis, terbuka atau tertutup. Pada aspek generikanya dari budaya politik, dapat dilihat dari hakekat, bentuk dan peranannya. Hakekat atau ciri-ciri pokok dari budaya politik menyangkut masalah nilai-nilai. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip dasar yang melandasi doktrin atau suatu pandangan hidup. Nilai-nilai yang dimaksud ini berhubungan dengan masalah tujuan, seperti nilai-nilai pragmatis atau utopis.

Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi, karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh 31 interaksi antar-orientasi dan antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak antar budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik masyarakat.

Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang objek-objek politik. Almond dan Verba mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi dan sikap budaya politik (Lastari, 2018), yaitu:

- a) Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota

negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan negara.

- b) Orientasi afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.
- c) Orientasi evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

3. Tipe-tipe Budaya politik

Almond dan Verba dalam (Suryana, 2020) memaparkan tentang budaya politik yang terjadi dalam masyarakat

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial (*parochial political culture*) adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang bisa ditemukan dalam masyarakat – masyarakat yang belum berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal.

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil dan sederhana, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan

tugas. Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan peranannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan/spiritual. Selain itu, dalam budaya politik parokial juga menyatakan adanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Masyarakat dengan budaya politik parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Dalam jenis budaya ini, anggota masyarakat cenderung tidak tertarik pada objek politik yang luas, tempat-tempat di mana mereka berhubungan erat, kecuali sampai batas tertentu. Kecuali dalam skala yang sangat kecil, tidak pernah ada situasi absolut di mana anggota masyarakat sama sekali tidak tertarik pada subyek politik. Yang sangat mencolok dari budaya politik masyarakat adalah bahwa anggota masyarakat sadar akan keberadaan pusat-pusat otoritas/kekuasaan politik di dalam masyarakat. (Suryana, 2020)

Orientasi parokial menyatakan ketiadaannya harapan-harapan terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan sistem politik lainnya. Dengan kata lain bahwa masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik termasuk bagian-bagian terhadap perubahan sekalipun. Dengan demikian parokialisme dalam sistem politik yang diterensiasi lebih bersifat efektif dan orientasi daripada kognitif.

Dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai budaya politik parokial apabila orientasinya tidak terlihat terhadap sistem politik secara keseluruhan terhadap input maupun output serta terhadap diri sendiri sebagai elit politik.

Indikator budaya politik parokial adalah sebagai berikut:

- a. Budaya politik ini berlangsung dalam masyarakat yang masih tradisional dan sederhana.
- b. Belum terlihat peran-peran politik yang khusus, peran politik dilakukan serempak bersamaan dengan peran ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.
- c. Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakatnya cenderung rendah.
- d. Warga cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali yang ada disekitarnya
- e. Warga tidak banyak berharap atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu dari sistem politik tempat ia berada.

2. Budaya Politik Kaula

Budaya politik kaula merupakan budaya politik yang mana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, juga memiliki kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output-nya. Perhatian yang frekuensinya sangat rendah atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Masyarakat yang berbudaya politik subjek/kaula, mereka memang memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) masih sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak

menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Namun demikian, posisinya sebagai subjek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Diyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apaapa terhadap perubahan politik. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan/kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubahubah, dikoreksi apalagi ditentang.

Ditandai dengan pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap ikut pada berbagai berita politik, namun tidak bangga kepada sistem politik negaranya serta peran komitmen emosionalnya rendah kepada negara. Dalam arti, secara emosional mereka tidak merasakan ada keterlibatan dengan negaranya. Mereka merasakan ketidaknyamanan jika memperbincangkan permasalahan perpolitikan. Mereka taat terhadap pejabat pemerintah maupun UU, namun tidak ada keterlibatan dirinya pada politik dan juga memberi suara saat pemilu. Sehingga, mereka tidak percaya orang lain dengan mudah. Di ujung yang lainnya, ketika berhadapan bersama institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. (Suryana, 2020)

Orientasi mereka yang sebenarnya terhadap objek politik dapat dilihat dalam ekspresi kebangsaan mereka, baik dalam ekspresi dukungan maupun

permusuhan mereka terhadap sistem, terutama dalam hal outputnya. Pada dasarnya, posisi subjektifnya adalah posisi pasif. Merasa tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem, mereka hanya tunduk pada semua instruksi dan keputusan pejabat masyarakat.

Segala keputusan (dalam arti output) yang diambil oleh pemeran politik (dalam arti memangku jabatan politik) dianggapnya sebagai sesuatu yang tak dapat diubah, dikoreksi apalagi ditantang. Tiada jalan lain baginya kecuali menerima saja sistem sebagai apa adanya, patuh, setia, dan mengikuti segala instruksi dan anjuran para pemimpin (politik)-nya. Apabila jika frekuensi orientasi terhadap sistem politik dan terhadap output itu sangat tinggi, manakala orientasi terhadap objek input dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik sangat rendah, maka budaya politik seperti ini disebut sebagai subjek. Artinya bahwa, hubungan mereka terhadap suatu keputusan dan sistem sebagai keseluruhan pada dasarnya adalah bersifat pasif. Jenis budaya politik ini kemungkinan besar wujud dalam masyarakat yang tidak mempunyai struktur input yang dibesakan. Orientasi subjek dalam sistem politik yang telah mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi lebih cenderung bersifat subjektif dan normatif daripada bersifat kognitif. (Suryana, 2020)

Menurut pandangan mereka, masyarakat mempunyai struktur, di mana perorangan ataupun kelompok sudah diguratkan menerima saja keadaan dan harus puas menerima "kodrat"-nya. Tingkat kepatuhan dalam budaya politik seperti ini sangat intens, seseorang hanya berfungsi sebagai "kaula". Jika ia tidak menyukai sistem dan output, itu disimpannya saja dalam sanubari. Sikap

pun juga demikian mungkin tidak dimanifestasikan secara terang-terangan, karena memang tidak adanya sarana/kapasitas untuk mengubah atau melawan. Budaya politik seperti ini merupakan hasil dari sebuah "bentukan" keadaan tertentu. Perlu kiranya dipertimbangkan untuk ditelaah, misalnya pengaruh status koloni, penjajahan, dan corak diktator/ otoriter terhadap budaya politik kaula ini. Dalam hal ini, sikap anggota masyarakat yang pasif bukan berarti secara potensial dapat diabaikan.

Budaya politik kaula ini biasanya berada pada masyarakat tradisional yang telah berkembang peradabannya. Masyarakat sudah mempunyai harapan tertentu pada sistem politik yang ideal.

Indikator budaya politik kaula/subjek adalah sebagai berikut:

- a. Warga menyadari sepenuhnya akan otoritas pemerintah.
- b. Tidak banyak warga yang memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, tetapi mereka cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah.
- c. Warga bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi, apalagi ditentang.
- d. Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak mampu berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
- e. Warga menaruh kesadaran, minat dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya dan terutama terhadap objek politik output, sedangkan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah.
- f. Masyarakat cenderung diam saat tidak setuju dengan keputusan yang diambil pemerintah.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik yang dicirikan melalui terdapatnya tindakan individu yang mengasumsikan diri sendirinya atau orang lain merupakan anggota aktif pada dunia politik. Individu secara mandiri sadar akan tiap hak dan tanggungjawabnya (kewajibannya) serta dapat pula merelaisasikan dan mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya. Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya, tidak begitu saja menerima kebijakan politik tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran, warga dapat menolak menurut penilaiannya sendiri, serta menjadi warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. Lalu, warga merasa bebas dan berani mendiskusikan masalah politik. Mereka merasa pada tingkatan tertentu, dapat memberi pengaruh jalannya perpolitikan negara.

Budaya politik partisipan hidup dalam masyarakat yang orang-orangnya melibatkan diri dalam kegiatan politik atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik. Budaya politik partisipan muncul jika orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif dikembangkan secara maksimal dan seimbang. Dengan budaya politik partisipan, maka kerja sistem politik demokrasi dapat dikembangkan karena pada budaya politik ini warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya sikap saling percaya (*trust*) antar warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik

Meraka juga merasakan ada kebebasan serta bisa melakukan pendirian organisasi politik baik untuk melakukan protes atau memberi dukungan pemerintahan. Apabila tidak melakukan pendirian organisasi politik, mereka pun banyak bergabung pada organisasi sukarela dengan sifat politik dan juga tidak. Ketika pemilu mereka cukup berbangga hati. (Suryana, 2020)

Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, berdisiplin mati, tunduk terhadap keadaan, tidak lain karena ia merupakan salah satu mata rantai aktif proses politik. Dengan demikian, seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran, baik sistem sebagai totalitas, input dan output maupun posisi dirinya sendiri. Oleh karena tercakupnya aliran input dan aliran output, ia sendiri terlibat dalam proses politik sistem politik tertentu, betapa pun kecilnya. Selain itu, pola sikap serta orientasi anggota masyarakatnya yang cenderung secara jelas berorientasikan sistem politik secara keseluruhan terhadap objek dan proses input, objek dan proses output, dan diri sendiri sebagai aktivis dalam proses politik. (Suryana, 2020)

Masyarakat yang memiliki budaya politik parokial cenderung tidak memiliki perhatian terhadap politik. Mereka cenderung apatis karena semua hal berkaitan dengan keputusan yang bersifat publik diserahkan atau tergantung kepada pemimpinnya. Masyarakat yang memiliki budaya politik subjek memiliki pengetahuan tentang sistem politik walaupun masih sederhana. Akan tetapi, kepedulian mereka terhadap politik lebih baik daripada masyarakat parokial. Walaupun mereka memiliki pengetahuan

tentang politik, tetapi masih minim dalam hal memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Masyarakat yang memiliki budaya partisipan memiliki pengetahuan dan mampu mengaplikasikan pengetahuan politik tersebut. Masyarakat lebih aktif dalam sistem politik seperti keterlibatannya dalam pemilihan umum, baik sebagai calon yang dipilih maupun pemilih. (Suryana, 2020)

Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidaklah menerima begitu saja keputusan politik. Hal itu karena masyarakat telah sadar bahwa begitu kecilnya mereka dalam sistem politik, meskipun tetap memiliki kesadaran, totalitas, masukan, keluaran dalam konstelasi sistem politik yang ada. Anggota-anggota masyarakat partisipatif diarahkan pada peranan pribadi sebagai aktivis masyarakat, meskipun sebenarnya dimungkinkan mereka menolak ataupun menerima.

Namun dalam suatu masyarakat kerap kali ditemukan inklinasi kepada salah satu tipe budaya politik, dalam budaya politik partisipan masih dapat dijumpai individu-individu yang tidak menaruh minat pada obyek-obyek politik secara luas. Menyadari realitas budaya politik yang hidup di masyarakat tersebut, Almond menyimpulkan adanya budaya politik campuran (mixed political culture) yang menurutnya lazim terjadi pada suatu masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan dan dinamika yang pesat, sehingga sistem politik bias berubah dan kultur serta struktur politik senantiasa tidak selaras.

Indikator budaya politik partisipan adalah sebagai berikut:

- a. Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya.
- b. Warga tidak menerima begitu saja keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan, input, output maupun posisi dirinya sendiri.
- c. Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik
- d. Masyarakat menyadari bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.
- e. Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi, seperti halnya penjual dan pembeli. Warga dapat menerima berdasarkan kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri.

4. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka

pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri tidak ada yang secara eksplisit mengatur bagaimana yang berkaitan dengan netralitas panitia.

Tetapi secara implisit kita tetap bisa menjustiskan dua hal yang bisa dipedomani, yaitu:

1. Bahwa azas pilkades adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Permendagri 112/2014, pasal 35, ayat (2)).

Empat azas di atas diperuntukkan kepada para pemilih, sedangkan dua azas yaitu jujur dan adil di atas diperuntukkan kepada panitia. Artinya panitia harus melaksanakan tugas kepanitiaan dengan jujur, yaitu jujur kepada siapapun, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada Tuhan. Panitia juga harus melaksanakan tugas kepanitiaan dengan adil, yaitu adil kepada siapapun, adil kepada diri sendiri, dan adil kepada Tuhan.

2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas, panitia pilkades diambil sumpahnya sebagaimana lazimnya pejabat, pegawai, atau petugas yang akan melaksanakan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan di NKRI.

Sumpah yang diucapkan oleh panitia tersebut harus dipahami, disadari, dan diyakini bahwa sumpah tersebut diucapkan kepada siapapun, kepada diri sendiri, dan kepada Tuhan. Sedangkan netralitas PJ Kades, Perangkat Desa, dan BPD diatur dalam pasal 30, ayat (2), yang berbunyi: (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan: a. kepala desa; b. perangkat desa; c. anggota badan permusyawaratan desa. Ayat tersebut di atas memberi petunjuk bahwa PJ Kades, Perangkat Desa, dan BPD dalam penyelenggaraan pilkades harus netral. Oleh sebab, apabila panitia pilkades, PJ Kades, Perangkat Desa, dan BPD, baik secara personal maupun komunal, maka bisa dituntut atau ditindak secara personal atau institusional karena jabatan dan/atau institusinya baik secara perdata maupun pidana apabila ditemukan bukti-bukti material maupun non material yang cukup. Pasal-pasal yang memungkinkan bisa dijadikan bidikan antara lain pasal tentang penyalagunaan wewenang, melanggar sumpah, pemalsuan, manipulasi, pemaksaan, pemerasan, penggelapan, pembocoran, dan lain-lain. Akibat yang ditimbulkan antara lain memperdatakan panitia, mempidanakan panitia, menghentikan pelaksanaan, dan membatalkan hasil pilihan. Maka dari itu, jujur dan adil serta menepati sumpah adalah kemutlakan bagi panitia pilkades.

Menurut penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara RI yang telah memenuhi persyaratan.

Pemilihan kepala desa adalah sebuah instrumen untuk membentuk pemerintahan modern dan Demokrasi, kegiatan pesta demokrasi dilaksanakan

di tingkat wilayah dengan skala terkecil, ini pada kenyataannya sudah oleh Peraturan Perundang-undangan Pemerintah tentang tata cara kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga semua rangkaian tahapan-tahapan mulai dari pembentukan panitia pemilihan kepala desa sampai pada tahap pelantikan oleh kepala desa yang terpilih dengan harapan sesuai dengan wilayah terkecil ini pada ketentuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu maka proses Pilkades akan berjalan seperti yang diharapkan tanpa mengganggu keutuhan masyarakat. Tentu yang menjadi harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk menjadi pemimpin dan menjalankan sistem pemerintahannya sebagai kepala desa di desa. (Yakin et al., 2020)

Pemilihan kepala desa diharapkan mampu dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi. Adapun proses pemilihan kepala desa yang setidaknya perlu diketahui dimulai dari kegiatan Penjaringan dan juga penyaringan kandidat atau bakal calon kades, penetapan kandidat yang berhak ikut dipilih oleh masyarakat memilih, pendaftaran pemilih, pemungutan surat suara, penghitungan surat suara, penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa (Yakin et al., 2020)

Selanjutnya di dalam penjelasan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,

makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-undang otonomi daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. (Muhazir, 2020)

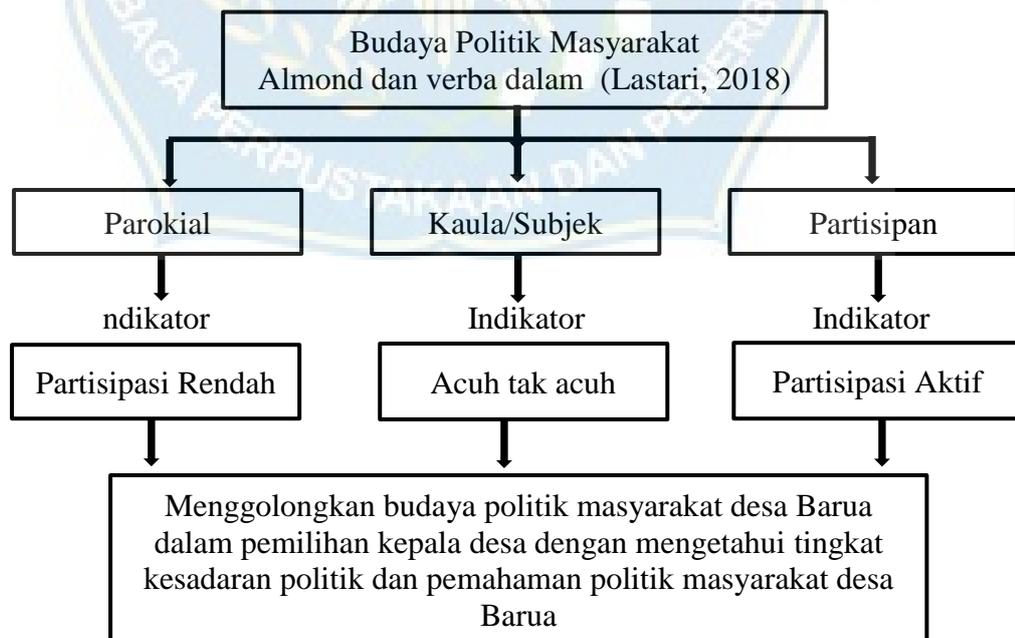
Desa merupakan subsistem dari pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. (Muhazir, 2020)

Bentuk keterlibatan tokoh masyarakat terhadap proses pemilihan kepala desa sangat diharapkan oleh pasangan bakal calon kepala desa yang bertarung dalam pemilihan kepala desa. Karena dari tokoh masyarakat tersebutlah yang bekerja keras mulai dari menentukan bakal calon kepala desa yang akan diusung dalam pemilihan, proses koalisi tokoh masyarakat yang ingin bergabung dalam memenangkan pasangan yang diusung, dan bahkan semua strategi politik dalam berkampanye semuanya dilakukan oleh tokoh masyarakat dan para tim pemenangan yang tergabung dalam koalisi. (Harun & Khalik, 2021)

C. Kerangka Pikir

Konsepsi budaya politik masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk mengilustrasikan tentang perilaku dan aktivitas perpolitikan masyarakat yang terjadi pada pemilihan kepala desa dan pengembangan partisipasi masyarakat. Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat desa Barua adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat. (Wardhani, 2018) Sehingga di desa Barua perlu dikaji dan dipahami bagaimana budaya politik yang terjadi di masyarakat serta mengukur pengetahuan politik masyarakat desa Barua dalam pemilihan kepala desa. Dengan melihat tingkat kesadaran politik masyarakat maka bisa di pahami bagaimana budaya politik yang terjadi di masyarakat desa Barua.

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian ini yaitu mengkaji dan memahami bagaimana budaya politik masyarakat dalam pilkades tahun 2021 di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian yaitu:

- a. Budaya politik parokial adalah sebuah budaya politik masyarakat desa barua dengan pemahaman politik masyarakat yang masih rendah.
- b. Budaya politik kaula merupakan budaya politik dengan tingkat kesadaran dan pemahaman politik masyarakat desa barua yang ditandai dengan adanya perhatian terhadap sistem politik tetapi keterlibatan mereka dengan cara yang pasif.
- c. Budaya politik partisipan ialah budaya politik masyarakat yang ada di desa barua yang dicirikan dengan tindakan yang mengasumsikan diri sendiri atau orang lain merupakan anggota aktif pada politik, masyarakat sebagai individu secara mandiri sadar akan tiap hak dan tanggung jawabnya (kewajibannya) serta dapat pula merealisasikan dan mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya di desa barua.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng dengan judul Budaya Politik Masyarakat dalam Pilkada Tahun 2021 Di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng dan dilakukan selama 2 bulan lamanya. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi sumber informasi dan pengambilan data yang dapat mendukung penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang budaya politik masyarakat desa Barua dalam pilkades tahun 2021 di Desa Barua kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan-permasalahan dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti yaitu bagaimana budaya politik masyarakat yang terjadi pada pilkades tahun 2021 di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijangkau dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dengan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok-pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Informan penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dimana metode tersebut metode tersebut adalah mengambil sampel yang dapat mewakili perspektif lebih luas dari kriteria, yang sudah ditetapkan sebelumnya dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian terkait budaya politik masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Status Informan	Jumlah
1	Samiruddin.S,	Pemerintah Desa	1
2	Sahiruddin	Tokoh Masyarakat	1
3	Ardi,S.E	Tokoh Pemuda	1
4	Rusli Subhan	Tokoh Agama	1
5	Asse dan Nuraeni	Tokoh Perempuan	2
6	Made'	Tokoh Adat	1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi

sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan budaya politik lokal apa saja yang terbentuk dalam pelaksanaan pilkades.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data

(data reduction), 2). Penyajian data (data display), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions).

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsaha Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbedabeda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber

masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng

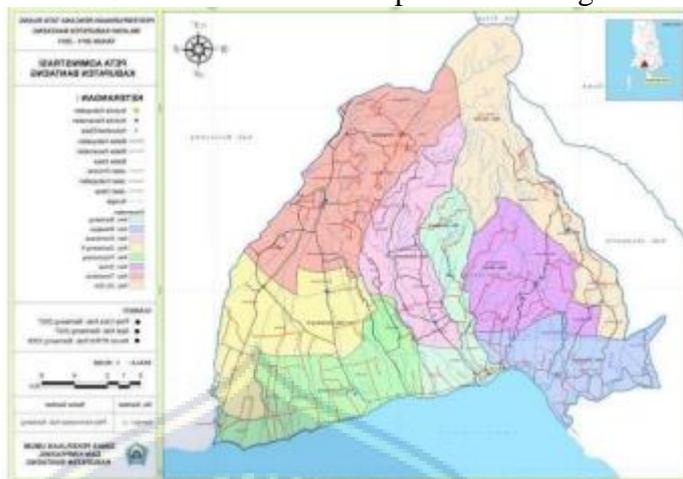
Kabupaten Bantaeng adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Berada di kawasan selatan Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih ± 120 km dari Kota Makassar. Luas wilayah Kabupaten Bantaeng termasuk dalam kategori 3 (tiga) Kabupaten/kota dengan luas terkecil di Sulawesi Selatan. Luasnya hanya 395,83 km², panjang pantai 21,5 km dengan lebar 4 mil atau hanya kurang lebih 0,87 persen dari luas total Sulawesi Selatan. Kepadatan penduduk sebesar 499 jiwa per kilometer persegi dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bantaeng. Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Bantaeng sebesar 1.376 jiwa per kilometer persegi dan terendah di Kecamatan Uluere sebesar 172 jiwa per kilometer persegi.

Gambar 4.1 Batas-batas wilayah

Utara	Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai
Timur	Kabupaten Bulukumba
Selatan	Kabupaten Jeneponto dan Laut Flores
Barat	Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang

Gambar 4.2 Peta Kabupaten Bantaeng



Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang

2. Gambaran Umum Desa Barua

Desa Barua dinamakan Jannang Barua yang dipimpin oleh seorang Jannang namanya Massiri dan pada tahun 1989 Barua dibentuk menjadi Desa Definitif yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa namanya Massiri.T tahun 1989-2006 dan pada tahun 2007 diadakan pemilihan dimenangkan oleh darmawan yang dimana adalah putra desa sebelumnya yaitu Massiri.T, pada tahun 2015 diadakan lagi pemilihan hingga beralih pemimpin Desa Barua pada tahun 2015 oleh Hasanuddin. Selanjutnya tahun 2021 kembali dilaksanakan pemilihan kepala desa sehingga terpilihlah Mursalin S.Pd dengan memperoleh 879 suara dari 5 calon. Berikut nama calon kepala desa barua pada pilkades tahun 2021. yaitu:

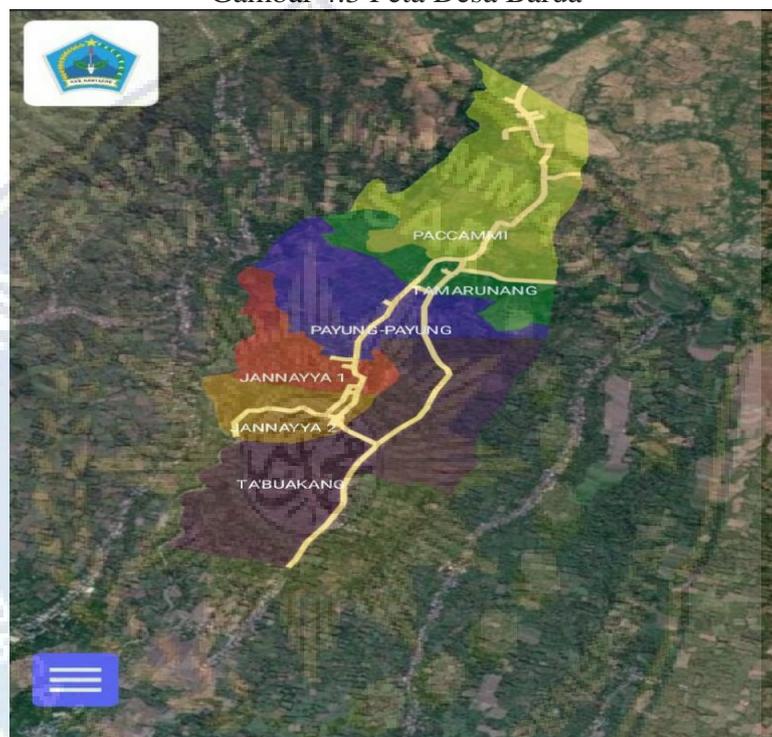
Table 4.1 Daftar Nama Calon

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehann Suara
1	Andi Tompo	167
2	Hasanuddin (Incumbent)	528
3	Mursalin, S.Pd	879
4	Amriani	143
5	Ahmad Kurnia	386

Desa Barua berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Tompobulu
- c. Sebelah Selatan : Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang
- d. Sebelah Barat : Desa Lonrong dan Desa Kampala Kecamatan Eremerasa.

Gambar 4.3 Peta Desa Barua



Sumber: <https://desabarua.gis.co.id/>

Desa Barua terdiri dari 6 Dusun yaitu :

- a. Dusun Tabbuakang,
- b. Dusun Jannayya1,
- c. Dusun Jannayya 2,
- d. Dusun Payung-Payung,
- e. Dusun Tamaruanng,
- f. Dusun Paccammi.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Barua tahun 2022

NO	NAMA DUSUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	JANNAYYA 1	268	292	560
2	JANNAYYA 2	228	226	454
3	TA'BUAKANG	398	384	782
4	PAYUNG-PAYUNG	235	272	507
5	TAMARUNANG	252	288	540
6	PACCAMMI	189	177	366
TOTAL		1.570	1.639	3.209

B. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang didapatkan peneliti selama melakukan penelitian di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng . Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai Budaya Politik Masyarakat Desa Barua Dalam Pilkades Tahun 2021 di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap semua perwakilan masyarakat yakni Pemerintah Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Pembahasan ini menjabarkan tentang Budaya politik masyarakat Desa Barua dalam pilkades tahun 2021 di Desa Barua Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng

Budaya politik sendiri cukup beragam di masyarakat. Bisa diambil budaya politik Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba tersebut antara lain: Budaya politik parokial, subjek/kaula dan partisipan.

a) Budaya politik Parokial

Budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah atau merupakan tipe budaya politik dimana ikatan seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Individu hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat dengan mereka, misalnya suku mereka, agama mereka, ataupun daerah mereka.

Berikut wawancara penulis dengan tokoh perempuan mengenai money politik dalam pemilihan kepala desa.

“Masih ditemukan masyarakat yang tidak datang ke TPS untuk memilih (hasil wawancara dengan AS 27-04-2023)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan tokoh perempuan bahwa masih adanya masyarakat yang tidak datang ke TPS untuk memilih kepala desa.

Sikap tersebut menjadi suatu contoh masyarakat tradisional yang masih menganut politik yang masih sederhana, ketika masyarakat tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa.

Dinamika politik yang terbangun pasca pilkades tampak ada sebuah fenomena yang terjadi diakibatkan oleh sikap masyarakat dalam menyikapi politik yang menitikberatkan pada sikap siap menang tidak siap kalah. Berikut wawancara penulis dengan tokoh masyarakat mengenai dinamika politik yang terjadi pasca pilkades.

“Gesekan yang terjadi pasca pilkades terjadi beberapa hal yaitu perombakan struktur pemerintahan di desa bahkan terjadi pemecatan staf dan juga adanya saling mematikan saluran air minum antar pendukung masing-masing calon” (hasil wawancara dengan SP 10-05-2023)

Dari hasil wawancara tersebut nampak terjadi dinamika ataupun gesekan-gesekan yang terjadi setelah pemilihan kepala desa dengan melakukan perombakan struktur pemerintahan bahkan terjadi saling mematikan saluran air minum antar pendukung masing-masing calon ini menunjukkan masyarakat dengan pola kesadaran yang masih sederhana

b) Budaya politik subjek/kaula

Budaya politik subjek/kaula yaitu budaya politik yang tingkatannya lebih tinggi dari parokial. Dalam budaya ini individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subjek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi tidak bangga atasnya, dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman sebab mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Budaya Politik Kaula memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dalam budaya politik partisipan. Budaya politik kaula sedikit kurang aktif dibandingkan budaya partisipan, dan mereka memiliki pemahaman yang sama tentang sistem politik sebagai warga negara. Mereka peduli dengan sistem politik, tetapi tidak terlalu bersemangat untuk ikut berpartisipasi bahkan

mereka merasa kurang tertarik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan politik.

Konteks budaya politik kaula, kesadaran masyarakat akan adanya kewenangan pemerintah atau kekuasaan dalam masyarakat cukup tinggi, hanya saja masyarakat tidak memiliki semangat untuk menganut budaya politik partisipan dalam pemilihan kepala desa. Secara umum masyarakat patuh dan loyal terhadap kebijakan pemerintah serta kebijakan pimpinannya seperti mengikuti berita-berita terkini mengenai situasi politik yang ada, akan tetapi mereka tetap acuh tak acuh dalam menanggapi kondisi yang terjadi dalam pemilihan kepala desa.

Berikut wawancara penulis dengan tokoh agama mengenai partisipasi politik masyarakat Desa Barua dalam pemilihan kepala desa.

“Kami sebagai masyarakat dalam pemilihan kepala desa, ada yang cukup antusias dan ada juga yang biasa-biasa saja, kami masih sama-sama menggunakan hak pilih kita untuk memilih calon kepala desa” (hasil wawancara dengan RS 27-04-2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa masyarakat Desa Barua dalam pemilihan kepala desa ada yang antusias dan ada juga yang biasa-biasa saja, masyarakat masih bersikap acuh tak acuh meskipun sama-sama menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa

Berikut wawancara penulis dengan tokoh pemuda terkait dengan sikap politik masyarakat Desa Barua dalam pemilihan kepala desa.

“Pemilih di Desa barua terdiri dari beberapa tingkatan, pemilih cerdas dan pemilih awam, pemilih cerdas melihat dari pendidikan dan pengalamannya kemudian pemilih awam, bagi masyarakat yang memiliki strata ekonomi ke bawah pada umumnya berharap uang baru menentukan pilihannya.” (hasil wawancara dengan AR 27-04-2023)

Dari wawancara di atas dapat diuraikan bahwa masyarakat desa barua dalam memilih seorang pemimpin terdiri dari beberapa tingkatan yaitu pemilih cerdas dan pemilih awam, pemilih cerdas menggunakan hak pilihnya dengan melihat dari pendidikan dan pengalamannya kemudian pemilih awam, bagi masyarakat dengan strata ekonomi kebawah pada umumnya berharap uang baru kemudian menentukan pilihannya.

Berikut wawancara penulis dengan tokoh perempuan mengenai kesadaran politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa

“Saya selalu berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dan saya sadar dengan apa yang menjadi pilihan saya itu merupakan kesadaran pribadi saya. Jika ada yang memberi uang saya terima, tapi saya tidak pasti memilih calon yang memberi saya tawaran uang.” (hasil wawancara dengan AS 27-04-2023)

Dari wawancara penulis dengan informan menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pilihan politik mereka, namun mereka tidak mudah mempercayai orang lain begitu saja untuk mengikuti keinginan mereka..

Sikap sebagian masyarakat Desa Barua sebagai aktor politik adalah pasif, artinya masyarakat tidak mampu berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sebab mereka merasa bahwa orang yang punya partisipasi yang tinggi hanya orang-orang yang dekat pemerintah.

Gambaran keadaan internal yang mempengaruhi pilihan individu masyarakat Desa Barua dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2021 bahwa, sebagian besar masyarakat Desa Barua bersikap positif dan menyambut dengan baik adanya pemilihan Kepala Desa di Desa Barua. Hal tersebut dibuktikan antara lain adanya kecenderungan setiap individu untuk

menyesuaikan diri dengan berbagai situasi sosial yang berkembang selama proses, mulai dari pendataan nama-nama daftar pemilih, masa kampanye hingga saat kegiatan pencoblosan tiba. Meskipun tidak semua masyarakat menunjukkan antusiasmenya dengan cara yang sama, misalnya ada yang aktif dalam kegiatan politik praktis misalnya menjadi anggota tim sukses salah satu dari ketiga calon, namun sebagian besar masyarakat menyambut proses pemilihan ini dengan hanya menjadi anggota masyarakat biasa yang disebabkan oleh adanya perbedaan motivasi pada masing-masing individu dalam masyarakat Desa Barua.

Berikut wawancara penulis dengan tokoh adat mengenai sikap masyarakat Desa Barua terhadap calon kepala desa yang terpilih.

“Jika ada pemerintah yang tidak menjalankan tugas dengan baik, maka kami tidak terlalu memperdebatkannya, karna yang punya kewenangan hanya kepala desa. yang penting kami bisa merasa aman dan tentram.” (hasil wawancara dengan Md 27-04- 2023)

Dari wawancara tersebut bahwa masyarakat Desa Barua menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah dan mereka cukup puas atas putusan pemerintah yang menurut mereka tidak bisa ditentang. Masyarakat kurang memberikan masukan dan tuntutan kepada pemerintah namun masyarakat merasa cukup puas terhadap apa yang diberikan oleh pemerintah, adanya sikap tersebut disebabkan karena merasa ia tidak punya kewenangan untuk mengawasi dan menuntut pemerintah.

Masyarakat menerima apa saja keputusan yang di anggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh di koreksi apalagi di tentang, karena harapan mereka

yang penting mereka merasa aman dan tentram mereka tidak menuntut banyak dari pemerintah desa

c) Budaya politik partisipan

Budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi diatas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Budaya politik partisipan mengacu pada jenis budaya politik di mana warga masyarakatnya sangat aktif dalam politik. Budaya politik ini dicirikan oleh sikap, perilaku, dan pandangan orang-orang yang terlibat dalam proses politik. Yang berorientasi pada pembentukan budaya politik partisipan, di mana memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk memilih pemimpin, membantu memimpin pemerintahan, dan mencopot pemimpin jika diketahui melanggar kontrak sosialnya.

Masyarakat desa Barua memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah melalui keterlibatan atau partisipasi mereka dalam pemilihan kepala desa dan dalam bentuk aktivitas politik lainnya. Namun yang lebih penting adalah cara mereka menanggapi kebijakan pemerintah begitu mereka

berkuasa. Warga negara yang sangat terlibat dalam politik cenderung menganggap diri mereka sebagai bagian dari pemerintah, bukan di luarnya. Sebagaimana wawancara penulis dengan tokoh agama mengenai hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

“Setiap ada pemilihan salah satunya yaitu Pemilihan Kepala desa, tentu kami di sini cukup antusias dalam memberikan aspirasinya untuk menyalurkan hak dan kewajibannya dalam pemilihan kepala desa.” (hasil wawancara dengan RS 27-04- 2023)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa masyarakat desa Barua dalam pemilihan kepala desa cukup antusias dalam menentukan pilihannya sebab mereka sadar hak dan kewajibannya sebagai masyarakat desa yang memiliki pengaruh dalam menentukan nasib desanya kedepan.

Masyarakat Desa Barua menyadari akan hak dan kewajibannya sehingga masyarakat tidak menerima begitu saja keadaan, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran.

Berikut wawancara penulis dengan tokoh pemuda mengenai pandangan masyarakat dalam pencalonan kepala desa.

“Pada saat setelah ada muncul bakal calon kepala desa, masyarakat disini sudah mulai terbentuk suatu pola atau masyarakat sudah mulai terpeta-petakan oleh pilihan calonnya masing-masing” (hasil wawancara dengan AR 27-04-2023)

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh pemuda bahwa pada awal mula munculnya bakal calon maka hal tersebut menjadi awal terbentuknya suatu pola di masyarakat atau masyarakat mulai terpeta-petakan dengan pilihan politiknya masing-masing.

Pembentukan budaya politik yang berkembang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai di masyarakat mengakibatkan timbulnya suatu

sikap masyarakat terhadap pemilihan kepala desa yang saling mendukung sesama masyarakat untuk menggunakan hak politiknya. Berikut wawancara penulis dengan tokoh perempuan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa:

“Pada saat pemilu saya selalu ikut dalam kegiatan pemilu sebagai pemilih dan juga saya sebagai tim sukses salah satu calon, masyarakat selalu hadir dan memberikan suaranya di TPS. Saya dan keluarga juga selalu hadir saat proses pilkades berlangsung, karena partisipasi masyarakat itu sangat penting agar pemimpin yang kita unggulkan dapat terpilih. Dan kadang kami masyarakat juga sering setiap duduk-duduk dengan tetangga sering bercerita mengenai calon”(hasil wawancara dengan AS 10-05-2023)

Dari hasil wawancara tersebut bahwa selain menggunakan hak pilih, turut serta dalam tim sukses agar pemimpin yang di unggulkan dapat terpilih. Sikap tersebut menggambarkan masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dan aktif dalam proses politik berlangsung.

Berikut wawancara penulis dengan tokoh masyarakat mengenai adanya money politik dalam pemilihan kepala desa

“Banyak tim sukses yang memberikan berbagai suapan tetapi saya tidak menerima uang pemberian dari tim sukses karena saya sadar bahwa uang itu tidak bisa menjamin kemakmuran desa ini dan kebanyakan yang menggunakan uang untuk menyogok (money politic) itu jika sudah berkuasa mereka tidak amanah. Dan saya tidak mau kesejahteraan rakyat selama 6 tahun dan selebihnya hanya dihargai dengan 200-500 ribu atau berapapun harganya.” (hasil wawancara dengan SP 27-04- 2023)

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat mengenai money politik dalam pemilihan kepala desa banyak tim sukses yang menjadikan money politik sebagai salah satu peluru untuk mendapatkan suara tetapi sebagian masyarakat menolak suapan tersebut karena mereka sadar bahwa money politik tersebut tidak bisa menjamin kemakmuran desa ini dan

kebanyakan mereka yang menggunakan money politik kalau sudah berkuasa mereka tidak amanah dan kesejahteraan masyarakat selama 6 tahun dan selebihnya dihargai dengan 200-500 ribu.

Ketika masyarakat sudah menentukan pilihan politiknya kadang hubungan masyarakat dengan masyarakat sekitar dan kepada petahana apabila berbeda pandangan politik maka hubungan tersebut sudah mulai renggang.

Berikut wawancara penulis dengan tokoh perempuan mengenai dinamika sosial antar masyarakat dan dengan incumbent atau petahana dalam pemilihan kepala desa.

“Yang terjadi di masyarakat, jika masyarakat tidak berpihak kepada petahana maka masyarakat tersebut sudah mulai enggan untuk datang ke kantor desa dan juga setelah ada kepastian calon maka hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya itu sudah mulai renggang dan pelayanan di desa sudah mulai pilih kasih” (hasil wawancara dengan Nr 10-05-2023)

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh perempuan mengenai hubungan sosial masyarakat dengan masyarakat dan petahana bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat apabila sudah ada kepastian calon maka masyarakat yang tidak berpihak kepada petahana maka masyarakat tersebut sudah mulai enggan untuk datang ke kantor desa dan hubungan masyarakat dengan masyarakat sudah mulai renggang dan juga pelayanan di desa sudah mulai pilih kasih.

Dalam pemilihan kepala desa di desa barua dilakukan dengan sistem *E-Voting* sehingga hasil pemilihan lebih cepat diketahui oleh masyarakat. Berikut hasil wawancara penulis dengan pemerintah desa mengenai penggunaan sistem *E-Voting* dalam pilkades

“Dari pandangan saya justru lebih baik jika kita menggunakan sistem *E-Voting* karena lebih efisien, dapat menghemat anggaran, mengurangi suara batal dan quick count meskipun ada anggapan masyarakat tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi tetapi ini hanya anggapan karena saya pernah menjadi tim kabupaten dan saya kira susah untuk kita berbuat kecurangan” (hasil wawancara dengan SS 7-04-2023)

Kondisi masyarakat yang demikian, tentu saja dapat menimbulkan kecenderungan pola dan sikap perilaku yang cukup variatif terutama menghadapi proses pemilihan Kepala Desa. Terbukti dari hasil pengamatan peneliti, respon mereka cukup variatif.

Berbeda dengan tanggapan tokoh agama mengenai sistem pemilihan menggunakan *E-Voting*. Berikut hasil wawancara penulis dengan tokoh agama mengenai teknis pemilihan kepala desa

“Saya lebih mendukung pilkades dilakukan dengan mencoblos kertas suara saja karena lebih transparan dan jauh dari kecurangan-kecurangan pada saat perhitungan dan saya anggap masyarakat yang lain juga lebih memilih itu” (hasil wawancara dengan RS 27-04-2023)

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa masyarakat aktif dalam menunjukkan bahwa anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap perpolitikan. Pengetahuan masyarakat mengenai politik cukup baik, mereka juga ikut serta dalam proses dan berpartisipasi saat peilkades dan mereka paham sekali dengan kepemimpinan yang baik. Masyarakat menyadari pilihan politik mereka, masyarakat desa barua menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah dan mereka cukup puas atas putusan pemerintah. Partisipasi politik masyarakat sangat antusias karena masyarakat hadir saat pemilu dan mereka berpartisipasi aktif dalam proses politik berlangsung. Anggota

masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik.

Keterlibatan masyarakat tidak terlepas dari beberapa alasan dalam menggunakan hak pilihnya. Semua terjadi karena kesadaran mereka atas kewajibannya sebagai warga masyarakat. Keikutsertaan mereka dalam Pilkada tahun 2021 secara tidak langsung turut mengubah desa mereka menjadi lebih baik. Mereka menyadari bahwa sebagai warga masyarakat harus menyalurkan aspirasinya dengan menggunakan hak pilihnya dengan berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa secara langsung.

C. Pembahasan

a. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah atau merupakan tipe budaya politik dimana ikatan seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Individu hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat dengan mereka, misalnya suku mereka, agama mereka, ataupun daerah mereka.

Suatu lingkungan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat akan lebih mengikuti alur dari lingkungan masyarakat itu sendiri untuk melakukan suatu interaksi yang terjadi ataupun

dalam mengungkapkan pendapat dan juga dalam mengeluarkan pikiran dan gagasan. Sehingga pikiran masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya jika masyarakatnya banyak orang yang tidak aktif ataupun banyak masyarakat yang menutup mata dan telinga mengenai isu politik ataupun isu sosial, otomatis masyarakat dengan jumlah kecil yang berpikiran berbeda akan mengikuti mayoritas pemikiran masyarakat yang banyak disana.

Sebagian masyarakat desa baru menganut tipe budaya politik parokial hal tersebut dilihat dari mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa, memilih hanya karena (money politik) sehingga baru kemudian menentukan pilihan mereka dan mereka tidak mementingkan urusan politik karena mereka berpikir siapapun yang menjadi pemimpin tidak akan bisa merubah kesejahteraan hidup mereka. Dengan adanya sikap apatis, pengetahuan masyarakat akan politik rendah, masyarakatnya yang cenderung sederhana dan tradisional, adanya ketidakpedulian dan juga penarikan diri dari kehidupan politik, anggota masyarakat condong tidak berminat terhadap objek politik yang luas, kesadaran mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakat rendah, tidak ada peranan politik bersifat khusus.

Pada akhirnya masyarakat pun mempercayakan pilihan politiknya kepada seorang tokoh masyarakat seperti orang yang di tokohkan di masyarakat yang mana memiliki pengaruh kuat di dalam lingkungan suatu masyarakat. Itulah sebabnya masyarakat cenderung apatis terhadap politik serta kesadaran akan politik rendah.

b. Budaya Politik Subjek/kaula

Budaya politik kaula (subjek), yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

Sebagian Masyarakat desa Barua termasuk kedalam tipe budaya politik kaula hal tersebut dapat di lihat dari kesadaran politiknya aktif tetapi mereka masih acuh tak acuh terhadap sistem politik.

Orientasi mereka yang sebenarnya terhadap objek politik dapat dilihat dalam ekspresi mereka, baik dalam ekspresi dukungan maupun permusuhan mereka dalam pemilhan kepala desa, Pada dasarnya, posisi subjektifnya adalah posisi pasif. Merasa tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem, mereka hanya tunduk pada semua instruksi dan keputusan pejabat masyarakat.

Masyarakat yang memiliki budaya politik subjek memiliki pengetahuan tentang politik walaupun masih sederhana. Akan tetapi, kepedulian mereka terhadap politik lebih baik daripada masyarakat parokial. Walaupun mereka memiliki pengetahuan tentang politik, tetapi masih minim.

Budaya politik yang lahir atas dorongan atau di mobilisasi oleh masyarakat yang memiliki kemampuan dan kekuatan besar sehingga masyarakat bisa saja mengikuti mereka dalam pemilihan kepala desa.

Di dalam masyarakat itu kesadaran sebenarnya di butuhkan pada individu itu sendiri, karena kesadaran itulah yang akan membuat masyarakat itu merubah pola budaya politik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa, dan dengan kesadaran pada masyarakat itu sendiri itulah yang akan membuat masyarakat itu tau mana yang memang kewajibannya dan mana yang bukan kewajibannya dalam pemilihan kepala desa, seseorang yang memiliki kesadaran walaupun ia hidup di lingkungan tidak aktif tidak akan terpengaruh, karena kesadaran akan tanggung jawabnya yang lebih kuat, jadi kesadaran masyarakat itu di perlukan pada masing masing individu untuk membentuk budaya politik yang baik sebagai masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

Pembentukan budaya politik masyarakat Desa Barua terlihat bukan hanya menggunakan hak pilihnya namun ketika terjadi masalah di desa maka dia merasa tidak punya kewenangan untuk memberi masukan padahal masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya pemilihan.

Kondisi masyarakat yang tidak mampu memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah tetapi mereka merasa cukup terhadap apa yang mereka

terima dari pemerintah. Masyarakat bersikap biasa saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh di koreksi apalagi di tentang.

Masyarakat Desa Barua masih menjunjung nilai kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, serta cenderung mengikuti pemimpin atau tokoh masyarakat yang dituakan dan berpengaruh di desa tersebut dalam pemilihan kepala desa. Perilaku tersebut sangat berpengaruh terhadap kesadaran politik masyarakat Desa Barua yang berada di wilayah perdesaan. Hingga pilihan masyarakat pun juga ditentukan oleh pilihan mereka yang dituakan dan dihormati dalam pemilihan kepala desa. Bagi mereka yang pilihannya berbeda dengan masyarakat pada umumnya maka akan berdampak pada hukuman sosial, yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat.

c. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Sebagian besar masyarakat Desa Barua tergolong ke dalam tipe budaya politik partisipan karena ke aktif-annya dalam proses pemilihan kepala desa, hal tersebut terlihat dari mereka yang banyak menjadi tim sukses calon, menjadi panitia pemilihan, menjadi pengawas partisipatif jalannya pemerintahan, mereka dapat mengkritik jalannya pemerintahan dan mereka juga sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga atau masyarakat.

Masyarakat Desa Barua menyadari bahwa ia adalah warga yang aktif dan berperan penting sebagai aktivis dalam proses berjalannya pemilihan kepala desa di Desa Barua, kesadaran politik inilah sebagai tolak ukur untuk membentuk sebuah budaya politik yang aktif dalam pemilihan kepala desa.

Masyarakat tidak dapat terlepas dari politik, hal tersebut sudah menyatu dengan kehidupan mereka. Kehidupan politik merupakan bagian dari interaksi hidup mereka, baik dengan sesama masyarakat maupun dengan pemerintah atau lembaga-lembaga di luar pemerintah (lembaga non-formal). Interaksi tersebut mengalami internalisasi ke dalam masyarakat yang selanjutnya membentuk beragam pandangan, sikap, dan pengetahuan tentang praktik-praktik politik dalam sistem politik yang akan menentukan bagaimana perilaku masyarakat tersebut.

Suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.

Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, berdisiplin mati, tunduk terhadap keadaan, tidak lain karena ia merupakan salah satu mata rantai aktif proses politik. Dengan demikian, seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran, baik sistem sebagai totalitas, input dan output maupun posisi dirinya sendiri. Oleh karena ia sendiri terlibat dalam proses politik sistem politik tertentu, betapa pun kecilnya. Selain itu, pola sikap serta orientasi anggota masyarakatnya yang cenderung secara jelas berorientasikan sistem politik secara keseluruhan.

Masyarakat yang memiliki budaya partisipan memiliki pengetahuan dan mampu mengaplikasikan pengetahuan politik tersebut. Masyarakat lebih aktif dalam sistem politik seperti keterlibatannya dalam pemilihan kepala desa, baik sebagai calon yang dipilih maupun pemilih.

Masyarakat Desa Barua memiliki kecenderungan yang variatif dalam menentukan sikap dan perilaku politik selama proses berlangsungnya pemilihan Kepala Desa. Mereka terlihat cukup antusias dalam menyambut datangnya hari pemungutan suara dengan berbagai cara. Di antaranya melalui diskusi-diskusi kecil yang dilakukan secara tidak sengaja pada waktu berkumpul dengan tetangga. Topik seputar isu nama-nama calon, hingga kualitas serta kredibilitas calon di mata masyarakat rupanya menjadi sebagian dari tema yang dibicarakan.

Masyarakat Desa Barua yang memiliki kesadaran politik yang tidak tergantung pada mereka yang ditokohkan ataupun dituakan. Dalam hal ini pilihan ditentukan atas dasar kehendak dan pandangan pribadi. Jadi tidak ikut-ikutan orang lain dalam menentukan pilihannya, sebab masyarakat memiliki pemikiran lebih terbuka dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Desa Barua dalam pemilihan kepala desa.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Budaya politik dipengaruhi oleh sikap dan lingkungan. Oleh karena itu, terkadang kita menemukan budaya politik setiap wilayah berbeda-beda. Bahkan bukan hanya itu, budaya politik antarindividu pun berbeda-beda. Perbedaan budaya politik ini dianggap wajar karena setiap orang memiliki pengalaman politik yang berbeda-beda.

Berdasarkan dari beberapa wawancara yang didapat oleh narasumber bahwa masyarakat Desa Barua pada Pilkades tahun 2021 tergolong kedalam budaya politik parokial, subyek/kaula dan partisipan. Hal ini dibuktikan dengan bahwa masyarakat Desa Barua masih memiliki minat, pengetahuan serta pemahaman terhadap aktivitas politik, namun sebagian masyarakat juga masih bersikap acuh tak acuh. Dan masih ditemukannya masyarakat yang memilih *money politik* dalam pemilihan kepala desa di desa Barua.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah supaya mampu memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat.
2. Bagi kepala desa diharapkan mampu menjadi pemimpin yang bisa membawa masyarakat kedalam budaya politik yang aktif.

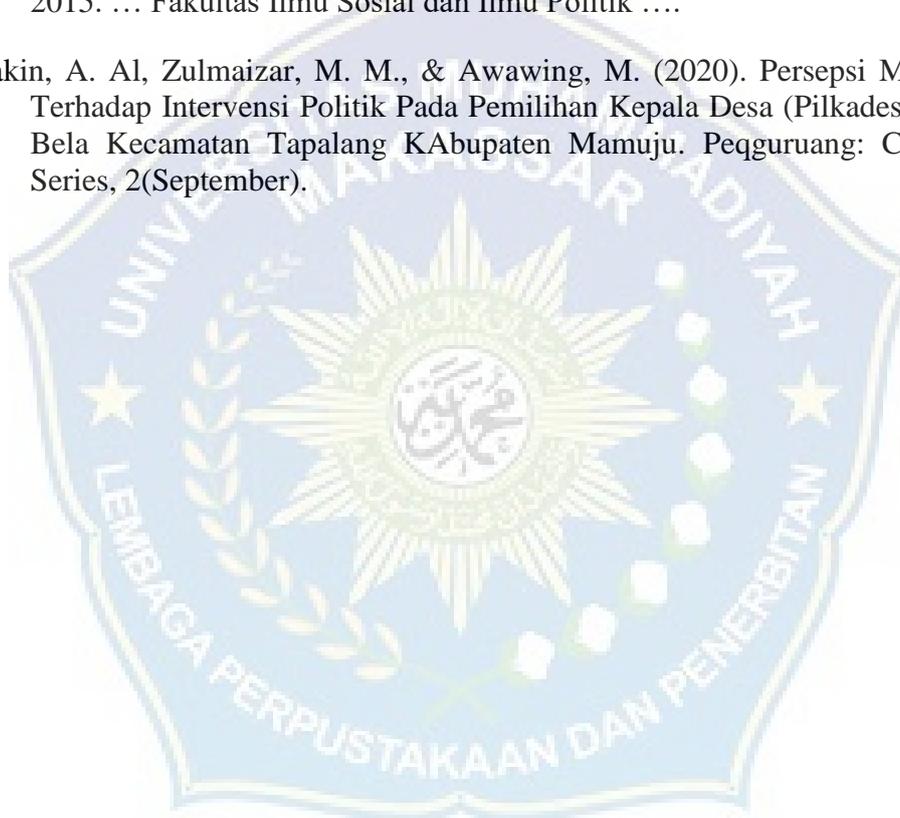
3. Bagi masyarakat di harapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman politiknya sehingga terbentuk budaya politik yang aktif.
4. Bagi peneliti selanjutnya untuk bisa mengembangkan penelitian ini dengan indicator baru yang terkait agar hasil yang di dapatkan bisa menghasilkan informasi yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Hamil, J., & Daud, S. (2018). Politik Baru Pasca PRU Ke-10 : Analisis Terhadap Transformasi. Sains Insani.
- Agustina, F., & Anshori, I. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19(Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo) Oleh : Universitas Muhammadiyah Sidoar. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Po*, 10(1), 34–46. <http://jurnal.umpalembang.ac.id/variahukum/article/view/942/839>
- Endana, R. (2022). Partisipasi dan budaya politik masyarakat Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo pada Pilkada Serentak Tahun 2020. *digilib.uinsby.ac.id*. <http://digilib.uinsby.ac.id/53469/>
- Harun, H., & Khalik, S. (2021). Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'Iyyah*, 3(1), 68–75.
- Ilna, M., Putri, D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., Nuriyah, S., & Fauzi, A. M. (2020). Politik Dan Tradisi : Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Politics and Traditions : Money Politics in. *Jurnal ISIP*, 17(2), 72–81.
- Lastari, A. (2018). Budaya Politik Masyarakat Kampung Arab Al-Munawar 13 Ulu Palembang. In *Biomass Chem Eng* (Vol. 3, Issue 2).<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0A>
- Mohd Zain, Z. (2021). Budaya politik masyarakat Melayu: Satu analisis. *Malaysian Journal of Society and Space*, 17(1), 297–311. <https://doi.org/10.17576/geo-2021-1701-22>
- Muhazir, A. (2020). Strategi Political Marketing Kandidat dalam Pilkadaes Serentak Periode III di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *AGUNA: Jurnal IlmuKomunikasi*, 1(1), 19. <http://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/AGUNA/article/view/1000>
- Pureklolon, D. T. T. (2021). Eksistensi Budaya Politik Di Indonesia : Sebuah Kajian. *Jurnal Communitarian*, 3(1), 405–430.
- Sapariah, Safitri, W. W., & Sarmila. (2022). Hubungan Kekuasaan Dengan Budaya Politik Di Kepulauan Riau. *Journal Of Comprehensive Science*, 1, 36–40.
- Sumartono. (2018). Budaya politik dalam masyarakat pragmatis. *Lugas*, 2(1), 20–26.

- Suryana, Y. (2020). Pengaruh pelaksanaan pemilihan umum serentak terhadap budaya politik. *Supremasi Hukum: Journal Penelitian Hukum*, 29(1), 13–28.
- Syuhada, O. (2020). Fenomena Budaya Politik Parokial Dan Perwujudandemokrasi Pancasila Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *JournalPresumptionof Law*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.336>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.
- Wardhanie, A. A. (2020). Budaya Politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Pada Pilkada Langsung Tahun 2015. ... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Yakin, A. Al, Zulmaizar, M. M., & Awawing, M. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Intervensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Bela Kecamatan Tapalang KAbupaten Mamuju. *Pegguruang: Conference Series*, 2(September).



LAMPIRAN

Foto Bersama Pemerintah Desa



Foto Bersama Tokoh Agama



Foto Bersama Tokoh Pemuda



Foto Bersama Tokoh Perempuan



Foto bersama tokoh adat



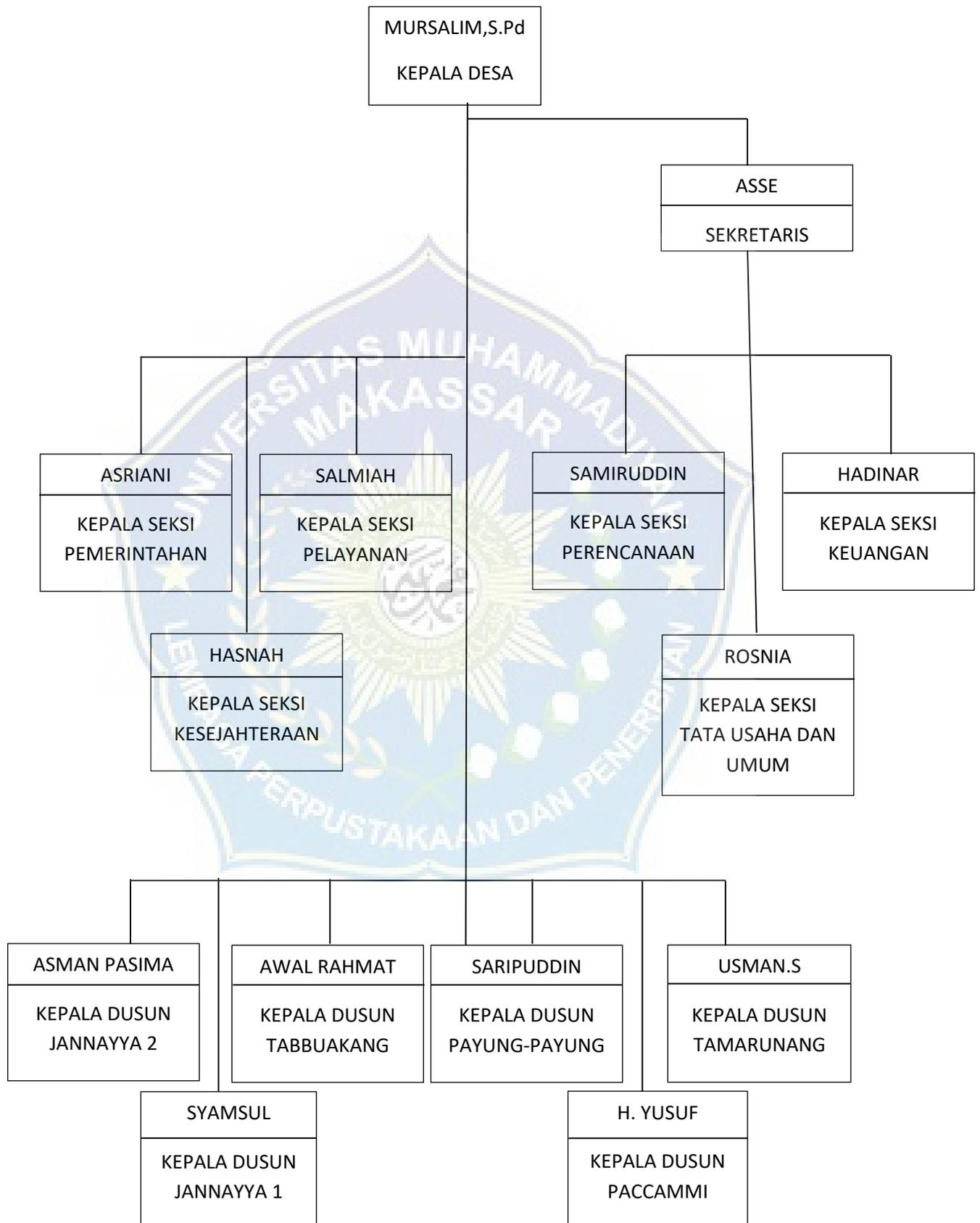
Foto bersama tokoh perempuan



Foto bersama tokoh masyarakat



Struktur Organisasi Desa Barua





**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221

Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588

Official Email: risip@unismuh.ac.id

Official Web: <https://risip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 2080/A.3-II/XII/1444/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Saldi Julianto
S t a m b u k : 10564 11086 19
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Budaya Politik Lokal Masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2021 (Di Desa Barua Kecamatan Eremerasa kabupaten Bantaeng)"

Pembimbing I : Hamrun, S.IP, M.Si
Pembimbing II : Nuhammad Randhy Akbar, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, di serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar
Pada Tanggal : 09 Desember 2022
D e k a n,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 730727.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
 Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Saldi Julianto
 Nomor Stambuk : 105641108619
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Penelitian : Budaya Politik Masyarakat Desa Barua Dalam Pilkada Tahun 2021 di
 Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. A. Rosdianti Razak, M.Si (Ketua)	4 Juli 2023	
2	Rudi Hardi, S.Sos., M.Si	5 Juli 2023	
3	Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si	9 Juli 2023	
4	Muh. Randhy Akbar, S.IP., M.Si	5 Juli 2023	

Makassar, 4 Juli 2023
 Mengetahui :
 Ketua Prodi

Ahmad Harikan, S.IP., M.H.I
 NBM: 1207 163



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Saldi Julianto
NIM : 105641108619
Program Studi: Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	3 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Juni 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Nussriani, S. Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

BAB I - Saldi Julianto

105641108619

by Tahap Tutup

Submission date: 14-Jun-2023 03:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 2115838057

File name: BAB_I_-_2023-06-14T155158.561.docx (19.81K)

Word count: 1722

Character count: 11219

BAB I - Saldi Julianto 105641108619

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.neliti.com Internet Source	4%
---	-----------------------------------	----

Exclude quotes On Exclude matches 2%

Exclude bibliography On



BAB II - Saldi Julianto

105641108619

by Tahap Tutup

Submission date: 14-Jun-2023 03:54PM (UTC+0700)
Submission ID: 2115838572
File name: BAB_II_-_2023-06-14T155159.644.docx (190.64K)
Word count: 3811
Character count: 25143

BAB II - Saldi Julianto 105641108619

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	3%
---	-----------------------------------	----

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%



BAB III - Saldi Julianto 105641108619

ORIGINALITY REPORT

6%	4%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%
★ repository.upi.edu
Internet Source



Exclude quotes Or Exclude matches 2%
Exclude bibliography Or



BAB III - Saldi Julianto
105641108619
by Tahap Tutup

Submission date: 14-Jun-2023 03:55PM (UTC+0700)
Submission ID: 2115839139
File name: BAB_III_-_2023-06-14T155158.098.docx (19.33K)
Word count: 1058
Character count: 7113

BAB IV - Saldi Julianto 105641108619

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

Exclude quotes

Exclude bibliography



< 2%



BAB IV - Saldi Julianto

105641108619

by Tahap Tutup

Submission date: 14-Jun-2023 03:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2115839692

File name: BAB_IV_-_2023-06-14T155157.337.docx (964.41K)

Word count: 3981

Character count: 25709

BAB V - Saldi Julianto 105641108619

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ rinastkip.wordpress.com

Internet Source



Exclude quotes

Or

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Or



BAB V - Saldi Julianto

105641108619

by Tahap Tutup

Submission date: 14-Jun-2023 03:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 2115840073

File name: BAB_V_-_2023-06-14T155200.443.docx (14.07K)

Word count: 346

Character count: 2209



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: fisp@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisp.unismuh.ac.id>

Nomor : 0494/FSP/A.6-VIII/III/1444 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Saldi Julianto
S t a m b u k : 105641108619
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.
Judul Skripsi : "*Budaya Politik Masyarakat Desa Barua dalam Pilkades Tahun 2021 di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng*"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 21 Maret 2023

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Akhmad Harakan, S.IP., M.HI
NBM : 1207 163



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dmpmsp.bantaengkab@gmail.com, website : dmpmsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/83/PL/DPM-PTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SALDI JULIANTO
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 N I M : 105641108619
 No. KTP : 7303032412000001
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
 Alamat : KP. Candiko Dusun Parangloe Kec. Eremerasa Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
"Budaya Politik Masyarakat Desa Barua dalam PilkaDes Tahun 2021 di Desa Barua Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng"

Lokasi Penelitian : Desa Barua Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng
 Lama Penelitian : 28 Maret 2023 s.d. 28 Mei 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak bertaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1202319009000083



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
 Pada tanggal : 27 Maret 2023

a.n. **BUPATI BANTAENG**

Usahawan Muda & Eksekutif Muda
 Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
 Pangkat : Pembina TK.I, IV/b



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1034/05/C.4-VIII/III/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

29 Sya'ban 1444 H
21 March 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0494/FSP/A.6-VIII/III/1444H/2023M tanggal 21 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SALDI JULIANTO
No. Stambuk : 10564 1108619
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DESA BARUA DALAM PILKADES TAHUN 2021
DI DESA BARUA KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Maret 2023 s/d 28 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **13828/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bantaeng
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1034/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SALDI JULIANTO**
Nomor Pokok : **105641108619**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DESA BARUA DALAM PILKADES TAHUN 2021 DI DESA BARUA KEC. EREMERASA KAB. BANTAENG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Maret s/d 28 Mei 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

RIWAYAT HIDUP



Saldi Julianto, Lahir pada tanggal 24 Desember 2000 , di Desa Parangloe Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Penulis Merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Sarifuddin dan Ibu Rosnaeni. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Inpres Parangloe dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Eremerasa dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat , penulis melanjutkan ke SMA Negeri 5 Bantaeng dan tamat pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosil Dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2023 Penulis mendapatkan gelar S1 pada program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Judul Budaya Politik Masyarakat Desa Barua Dalam Pilkades Tahun 2021 di Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.